

LAPORAN KINERJA









BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH **KABUPATEN BANTUL**







Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1

LAPORAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Namun dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu tindaklanjut penyesuaian nomenklatur sub kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dengan melakukan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Oleh karena itu disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien,

baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, Februari 2024

A BADAN PERENCANAAN

BANGUNAN DAERAH,

IF FENTY YUSDAYATI, MT NIP. 196704031994032008

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman pada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021, dan mengalami perubahan menjadi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. Perumusan program kerja Badan;
- b. Perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah di bidang pemerintahan, Pembangunan manusia, perekonomian dan sumberdaya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan Pembangunan daerah:
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- g. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
- h. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
- Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, system pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Badan;
- j. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;

- k. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa dua indikator berkriteria **Sangat Tinggi** dan satu indikator berkriteria **Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 96,49%. Ada 2 (dua) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

- 1. Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD
- Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan
 Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria Tinggi (75,1% s/d 90%), yaitu :
 - Persentase indikator RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata P	engantar	ii
Ikhtisar	Eksekutif	iv
Daftar	si	vii
Daftar ⁻	Tabel	ix
Daftar (Gambar	x
Bab I	Pendahuluan	11
A.	Latar Belakang	11
B.	Pembentukan OPD	11
C.	Susunan Organisasi	14
D.	Keragaman SDM	14
E.	Isu Strategis	15
F.	Cascading Kinerja	17
G.	Peta Proses Bisnis	19
Н.	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	19
Bab II	Perencanaan Kinerja	21
A.	Rencana Strategis	21
	1. Tujuan dan Sasaran	22
	2. Kebijakan, Strategi dan Program	23
B.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	26
C.	Program untuk Pencapaian Sasaran	29
D.	Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	29
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	30
A.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	31
B.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kineria	32

	1.	Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan	
		Evaluasi Pembangunan Daerah	32
	2.	Sasaran Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan	
		dalam Pembangunan	47
C.	Akı	untabilitas Anggaran	71
D.	Efis	siensi Sumber Daya	74
E.	Lin	tas Sektor	75
Rah IV	Pei	nutun	77

Daftar Tabel

Tabel I 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin, dan	
Kompetensi	15
Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	
Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24
Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	25
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	26
Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023	27
Tabel II. 6 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023	29
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	31
Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkanya Kualitas	
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	33
Tabel III. 4 Data Jumlah Program RKPD dan RPJMD	34
Tabel III. 5 Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2023	38
Tabel III. 6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Penerapan	
Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan	47
Tabel III. 7 Data Jumlah Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023	48
Tabel III. 8 Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan	49
Tabel III. 9 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023	71
Tabel III. 10 Realisasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Tahun 2023	72
Tabel III. 11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	73
Tabel III. 12 Pencapaian Anggaran Per Sasaran Tahun 2023	73
Tabel III. 13 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	74
Tabel III. 14 Efisiensi Anggaran Per Sasaran Tahun 2023	75
Tabel III. 15 Lintas Sektor Bappeda Kabupaten Bantul	75

Daftar Gambar

Gambar III-1 Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Tahun 2024	. 35
Gambar III-2 Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2024	. 35
Gambar III-3 FKP Ranwal RPJPD Tahun 2025-2045	. 36
Gambar III-4 Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2023	. 36
Gambar III-5 Peningkatan Kapasitas Perencanaan Kalurahan	. 37
Gambar III-6 Rapat Koordinasi Pengendalian Tahun 2023	. 44
Gambar III-7 Bimtek Aplikasi ESAKIP	. 45
Gambar III-8 Bantul Innovation Award Tahun 2023	. 69
Gambar III-9 Studio Inovasi Bantul	69

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

- 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

B. Pembentukan OPD

Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul seperti yang tercantum pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan program kerja Badan
- b. Perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, dan pengembangan
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, dan pengembangan
- d. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumberdaya alam serta infrastruktur dan kewilayahan
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pembangunan daerah
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Badan
- g. Pengoordinasian tugas dan fungnsi satuan organisasi Badan
- h. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan
- Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, system pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Badan
- j. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan
- k. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

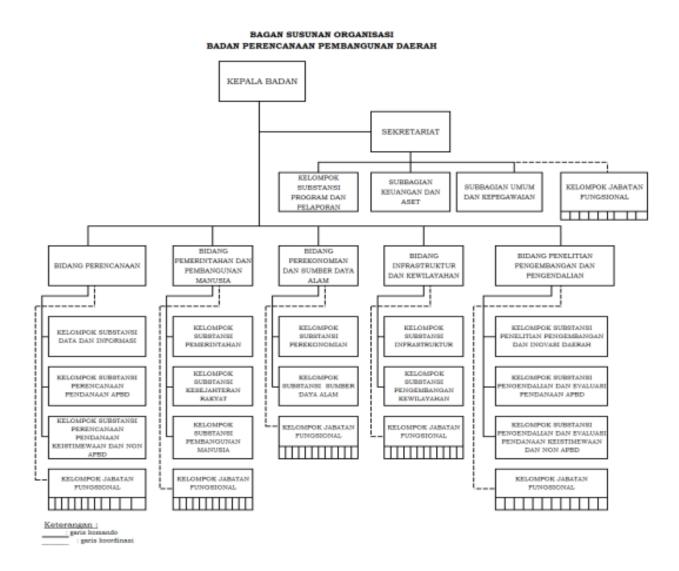
- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas:

- i. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
- ii. Subbagian Keuangan dan Aset
- iii. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan, terdiri atas:
 - i. Kelompok Substansi Data dan Informasi
 - ii. Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD
 - iii. Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 - i. Kelompok Substansi Pemerintahan
 - ii. Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat
 - iii. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - i. Kelompok Substansi Perekonomian
 - ii. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
 - i. Kelompok Substansi Infrastruktur
 - ii. Kelompok Substansi Kewilayahan
- g. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian, terdiri atas:
 - Kelompok Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
 - ii. Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD
 - iii. Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD
- h. Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kelompok Substansi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris/Kepala Bidang.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin, dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI					PEGAWAI YANG ADA				JENIS KELAMIN			
		Jml		Kua	lifikasi		Jml			Kualifi	kasi		Laki	Perempuan
1	2	3			4		5			6			7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP		
	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			1	1						1
	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	6		6			6	6					2	4
	2. Pengawas	2		2			2	1		1			1	1
	3. Pelaksana	30		16	7	7	17	1	7	2	6	1	8	9
	Jabatan Fungsional	36		33	3		24	9	12	3			9	15
	Jumlah	75		58	10	7	50	18	19	6	6	1	20	30

Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 19 orang (38%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 18 orang (36%), D3 6 orang (12%), SLTA 6 orang (12%), dan SMP 1 orang (2%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 25 orang, terdiri dari 12 orang pejabat pelaksana substantif dan 13 pejabat pelaksana administratif. Terdapat 9 orang pegawai yang melebihi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif, dan tidak ada pegawai yang tidak kompeten melaksanakan tugas dalam jabatan pelaksana substantif.

E. Isu Strategis

Sub bab ini menguraikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

- Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan daerah serta meningkatkan keselarasan antara perencanaan Pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan jangka pendek daerah dengan pelaksanaannya di Perangkat Daerah;
- 2. Meningkatkan peran kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- 3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur perencana;
- 4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta kelitbangan;
- Meningkatkan ketepatan dan validasi data perencanaan Pembangunan daerah dengan mendorong Perangkat Daerah untuk menyediakan data dan informasi yang akurat sesuai tupoksinya;
- 6. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaringan aspirasi dalam proses perencanaan;
- 7. Adanya sanksi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan;
- Kecenderungan semakin meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat serta stakeholders lainnya dalam perencanaan pembangunan dan semakin meningkatnya tuntutan agar aspirasi masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan;
- 9. Tuntutan integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanan agar tujuan dan sasaran pembangunan mengalir dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten;
- 10. Tuntutan daerah untuk lebih fokus pada pencapaian pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat;

- 11. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat yang menuntut ketersediaan sarana prasana dan kesiapan SDM di bidang perencanaan pembangunan;
- 12. Perkembangan Pembangunan wilayah yang sangat pesat, baik yang berdimensi regional maupun nasional sehingga menuntut kesiapan aparat perencanaan dalam melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan yang berbasis wilayah;
- 13. Keterhubungan dan sinkronisasi (link and match) antara kebutuhan penelitian dan pengembangan dengan perencanaan pembangunan; dan
- 14. Penumbuhan dan penciptaan inovasi sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan daerah.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

Misi 1: *Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima *

Tujuan : *Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN*

Sasaran Daerah : *Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel*

Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: *Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah*

Program : Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Indikator : Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas

Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator: (1) Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD), (2) Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi

Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator: (1) Persentase kesuaian sub kegiatan Renja PD dan Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, (2) Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang perekonomian dan SDA, (3) Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahan

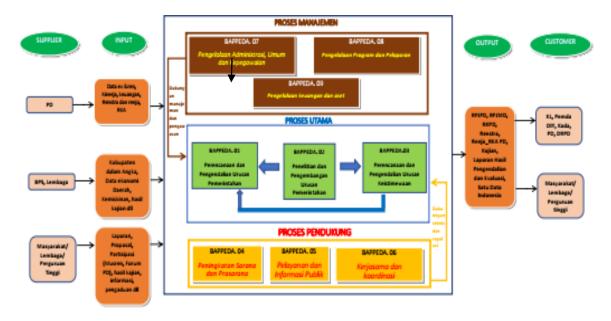
Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan*

Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah

Indikator : Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan roadmap SIDa

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:



Sumber: Dokumen Proses Bisnis Bappeda Kabupaten Bantul

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/064.A/Ev.SAKIP/2023 tanggal 29 Maret 2023, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK			
		LANJUT			
1.	kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas	kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik			

dapat ditingkatk	dipertahankan kan	bahkan	dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
			Upaya yang dilakukan, yaitu:
			Desk per bidang/sekretariat untuk pencermatan realisasi capaian kinerja setiap bulan;
			 Desk per bidang/sekretariat untuk rencana pelaksanaan kinerja tahap berikutnya setiap bulan;
			 Koordinasi dan pembinaan pegawai setiap hari melalui apel pagi secara virtual.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika".

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga

berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaran pemerintahan negara. Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

MISI 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sasaran yang daerah yang di dukung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah (1) meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan daerah, dan (2) meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam Pembangunan dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : (1) Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD, (2) persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi, dan (3) persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan.

Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, Sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU					
1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah	1. Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD 2. Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi					
menghadirka n pelayanan public prima		Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam Pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan					

Sumber: Renstra Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera, dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1: Penguatan refo	ormasi birokrasi menuju pemerintahan ya	ng efektif, efisien, bersih, akuntabel dan meng	hadirkan pelayanan publik prima
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan ketersediaan data serta hasil pengendalian untuk mendorong Kerjasama yang searah dengan RPJMD	Optimalisasi kemampuan SDM dan kualitas analisis data dan informasi; Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu; Perencanaan terpadu yang didukung
		Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit serta Kerjasama dengan berbagai <i>stakeholders</i> dalam penyusunan perencanaan	dengan pendanaan 1. Peningkatan koordinas Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 2. Peningkatan koordinas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); Peningkatan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
	Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam Pembangunan	Meningkatkan Kerjasama dengan berbagai <i>stakeholders</i> dalam proses kelitbangan	Peningkatan Kerjasama berbaga stakeholders dalam proses kelitbangan

Sumber: Renstra Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- 5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
- 6. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas	1. Tingkat keselarasan program RKPD
	perencanaan, pengendalian dan	dengan RPJMD
	evaluasi pembangunan daerah	2. Persentase indikator sasaran RPJMD
		yang mencapai predikat Tinggi dan
		sangat tinggi
2	Meningkatnya penerapan	Persentase hasil penelitian dan
	penelitian dan pengembangan	pengembangan yang dimanfaatkan
	dalam Pembangunan	

Sumber: Renstra Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan cascade down Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan(cascading eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (cascading eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 dan PK Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

N	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	. Meningkatnya	Tingkat	Persen	100		-
	kualitas	keselarasan			I	100
	perencanaan,	program RKPD			III IV	-
	pengendalian,	dengan				
	dan evaluas	i RPJMD				
	Pembangunan	Persentase	Persen	96	I	-
	daerah	indikator				
						-
		sasaran				-
		RPJMD yang			IV	96
		mencapai				
		predikat Tinggi				

		dan Sangat				
		Tinggi (%)				
2.	Meningkatnya	Persentase	Persen	100	I	100
	penerapan	hasil penelitian			l	100
	pericrapan	riasii periciliari			Ш	100
	penelitian dan	dan			IV	100
	pengembangan	pengembangan				
	dalam	yang				
	pembangunan	dimanfaatkan				

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp273.415.000,00
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan	Rp626.161.000,00
	Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	·
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi	Rp7.649.879.681,00
	Umum)	
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan	Rp2.012.003.810,00
	Evaluasi Pembangunan Daerah (Dana	
	Alokasi Umum)	
5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi	Rp1.708.681.220,00
	Perencanaan Pembangunan Daerah (Dana	
	Alokasi Umum)	
6	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp529.109.860,00
	Daerah (Dana Alokasi Umum)	-
	Jumlah Anggaran	Rp12.799.250.571,00

^{*)} Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Sumber: Bappeda, 2023

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya	Tingkat	Persen	100	l	-
	kualitas	keselarasan			I	100)*
	Rualitas				Ш	-
	perencanaan,	program RKPD			IV	-
	pengendalian,	dengan				
	dan evaluasi	RPJMD				
	Pembangunan	Persentase	Persen	96	I	-

	daerah	indikator			I	-
		sasaran			III	-
		RPJMD yang			IV	96)*
		, ,				
		mencapai				
		predikat Tinggi				
		dan Sangat				
		Tinggi (%)				
2.	Meningkatnya	Persentase	Persen	100	I	100
	penerapan	hasil penelitian			I	100
		·			III	100
	penelitian dan	dan			IV	100
	pengembangan	pengembangan				
	dalam	yang				
	pembangunan	dimanfaatkan				

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan	Rp273.415.000,00
	Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan	Rp453.541.000,00
	Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan	
	Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp8.692.377.381,00
	Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi	
	Umum)	
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan	Rp1.887.448.810,00
	Evaluasi Pembangunan Daerah (Dana	
	Alokasi Umum)	
5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi	Rp2.079.932.720,00
	Perencanaan Pembangunan Daerah (Dana	
	Alokasi Umum)	
6	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp581.568.860,00
	Daerah (Dana Alokasi Umum)	
	Jumlah Anggaran	Rp13.905.283.771,00

^{*)} Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Sumber: Bappeda, 2023

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel II. 6 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian	5
	dan evaluasi Pembangunan daerah	
2.	Meningkatnya penerapan penelitian dan	1
	pengembangan dalam Pembangunan	

Sumber: Renstra Bappeda Kabupaten Bantul tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di (SAKIP) lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi https://esakip.kab-bantul.id/ yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evalusi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

		Capaian		2023	Target	Capaian	
No	Indikator Kinerja Utama	2022	Target	Realisasi	% Realisasi	Akhir Renstra (2026)	s/d 2023 terhadap 2026 (%)
1	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100	100%	100
2	Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan Sangat Tinggi	100%	96%	89,47%	93,19	97%	92,24
3	Persentase hasil penelitian dan	100%	100%	100%	100	100%	100

		Capaian	2023			Target	Capaian
No	Indikator Kinerja Utama	2022	Target	Realisasi	% Realisasi	Akhir Renstra (2026)	s/d 2023 terhadap 2026 (%)
	pengembangan yang dimanfaatkan						

Sumber: esakip ROPK tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023, disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** dan 1 (satu) indikator sasaran berkriteria **Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 96,49%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah memiliki dua indikator. Indikator pertama yaitu Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD, dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai institusi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan Pembangunan harus memastikan dan mengawal dalam penyusunan RKPD, program yang ada pada Perangkat Daerah sesuai dengan yang terdapat dalam RPJMD. Sedangkan indikator kedua adalah persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi. Untuk mencapai target indikator ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengawal dan mendampingi melalui monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah yang mendukung sasaran daerah.

Selanjutnya rencana dan realisasi capaian sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah ditampilkan pada table III-3 berikut:

Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkanya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

			2023	2023			Capaian terhadap
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Target	Realisasi	% Realisasi	Akhir Renstra (2026)	Akhir Renstra tahun 2026(%)
1.	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	100	100	100	100	100%	100
2.	Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	100	96	89,47	93,19	97%	92,24

Sumber: esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator pertama yaitu tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**, dan untuk indikator kedua yaitu persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi adalah 96%, realisasi sebesar 89,47%, tercapai 93,19% atau bernilai kinerja **Tinggi**. Indikator tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 sama dengan capaian tahun 2022. Indikator persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 100% atau tercapai sebesar 105,26%, maka capaian tahun 2023 dengan realisasi 89,47% atau tercapai 93,19% mengalami penurunan sebesar 10,53%.

Pada indikator tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD, target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026. Untuk indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi, target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 97%, maka capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 92,24% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Formulasi dari indikator kinerja tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD adalah jumlah program RKPD dengan RPJMD yang sesuai dibagi dengan jumlah program RPJMD dikali dengan 100. Data pendukung dalam pencapaian indikator kinerja tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD ditampilkan dalam table III-4:

Tabel III. 4 Data Jumlah Program RKPD dan RPJMD

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2023
1	Jumlah program RKPD dengan RPJMD yang sesuai	Program	287
2	Jumlah program di RPJMD	Program	287

Sumber: Data Bappeda Tahun 2023

Permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD:

- 1. Belum semua data yang dientri ter-update
- 2. Adanya perubahan regulasi/kebijakan setelah dokumen perencanaan ditetapkan.
- Belum adanya kejelasan dari Pemerintah Pusat terkait aplikasi yang akan digunakan dalam perencanaan antara SIPD.go.id, SIPD-RI atau SIPD Kemendagri

Solusi:

- 1. Melakukan validasi data secara berjenjang;
- 2. Proaktif terhadap perubahan regulasi/kebijakan.
- 3. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan DIY terkait penggunaan aplikasi SIPD

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan faktor risiko yang ada:
- b. Mengoptimalkan kemampuan SDM dan ketersediaan data serta hasil pengendalian untuk mendorong kerjasama yang selaras dengan RPJMD;
- c. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit serta kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam penyusunan perencanaan.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan indikator kinerja tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD:



Gambar III-1 Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Tahun 2024



Gambar III-2 Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2024



Gambar III-3 FKP Ranwal RPJPD Tahun 2025-2045



Gambar III-4 Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2023



Gambar III-5 Peningkatan Kapasitas Perencanaan Kalurahan

Formulasi dari indikator kinerja utama persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi yaitu jumlah indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi dibagi dengan jumlah indikator sasaran RPJMD dikali dengan 100. Data pendukung dalam pencapaian indikator kinerja utama persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi ditampilkan dalam tabel III-5:

Tabel III. 5 Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2023

					20	23				
NO.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RPJMD 2021-2026	Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Persentase capaian	PREDIKAT	OPD PENGAMPU	KETERANGAN/ PENJELASAN
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,1815	4,1815	3,1958	76,43%	Sedang	KEMENDAGR I (Bag. TAPEM)	Penilaian atas LPPD tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2023
	dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi	BPK (BPKPAD)	Capaian tahun 2023 atas LKPD 2022
		Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	83,5	83,5	94,49	113,16%	Sangat Tinggi	KPK (Inspektorat)	Capaian tahun 2023, berdasar surat dari KPK No. B/631/KSP.00/70- 74/01/2024 tanggal 30 Januari 2024, perihal: Evaluasi Realisasi Capaian MCP Tahun 2023
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,3	3,30	3,72	112,73%	Sangat Tinggi	KEMENPANR B (Diskominfo)	Capaian Tahun 2023
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88,4	88,4	88,73	100,37%	Sangat Tinggi	Bag. Organisasi	Capaian 2023
2	Terwujudnya derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,11	74,11	74,64	100,72%	Sangat Tinggi	BPS Bantul	Capaian Tahun 2023 berdasarkan BRS No.

	masyarakat yang tinggi									89/12/34/Th.XXV, 1 Desember 2023
3	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,25	15,25	15,61	102,36%	Sangat Tinggi	BPS Bantul	Capaian Tahun 2023 berdasarkan BRS No. 89/12/34/Th.XXV, 1 Desember 2023
4	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Desa/Kalurahan Pamor Budaya	Kaluraha n	6	6	10	166,67%	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Capaian Tahun 2023
5	Terwujudnya kehidupan Masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Persen	100	100	100	100%	Sangat Tinggi	Satpol PP	Capaian Tahun 2023
6	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini	Angka	0,35	0,350	0,454	70,28%	Sedang	BPS Bantul	Capaian Tahun 2023 berdasarkan table dinamis BPS (https://yogyakarta.bps.g o.id/indicator/23/333/1/gi ni-ratio-menurut- kabupaten-kota.html)
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,5	3,5	3,78	92%	Sangat Tinggi	BPS Bantul	Capaian Tahun 2023 berdasarkan BRS No.83/11/34/Th.VVV, 6 November 2023
		Capaian Jaringan	Persen	90	90	94	104,44%	Sangat Tinggi	Indonesia	Capaian Tahun 2023

		Kabupaten Kreatif							Creative Cities Network (ICCN) atau Jejaring Kota/ Kabupaten Kreatif Indonesia	
7	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	75,05	75,05	75,69	100,85	Sangat Tinggi	DPUPKP	Realisasi tahun 2022. Masih proses penghitungan sampai akhir Januari
		Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,05	75,03	75,57	100,72%	Sangat Tinggi	DPTR	Capaian Tahun 2023
8	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,59	63,59	63,68	100,14%	Sangat Tinggi	DLH	Capaian Tahun 2023
9	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	169,94	169,94	149,27	112,16%	Sangat Tinggi	BNPB (BPBD)	Capaian Tahun 2023
10	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan social (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	71.667	71.667	40.323	199,94%	Sangat Tinggi	Dinsos	Capaian Tahun 2023
11	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71,01	71,01	65,06	91,62%	Sangat Tinggi	BPS (DP3AP2KB)	Realisasi merupakan proyeksi dengan model Single Exponential Smoothing Realisasi tahun 2023

									menunggu rilis dari BPS
	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Utama	Utama	Utama	100%	Sangat Tinggi	KEMENPPA (DP3AP2KB)	Capaian Tahun 2023
Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi						89,47%			

Sumber : Data Bappeda Tahun 2023

IKU persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi tidak mencapai target karena ada dua indikator sasaran daerah yang mendapatkan predikat sedang, yaitu Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dan Rasio Gini.

Nilai EPPD berpredikat sedang karena beberapa hal, antara lain:

- a. Belum terakomodirnya Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD secara keseluruhan ke dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah pelaksana IKK urusan, sehingga pencapaian beberapa Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian belum maksimal.
- b. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait LPPD dan EPPD, maka penetapan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengalami perubahan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pengukuran skor kinerja dan status kinerja EPPD yaitu EPPD tahun 2019 menggunakan peraturan lama maka skor kinerja 3,4463 berstatus kinerja Sangat Tinggi, dan target EPPD tahun 2022 menggunakan peraturan baru maka skor kinerja 2,92 berstatus kinerja Sedang

Nilai Rasio Gini berpredikat sedang menunjukkan bahwa pemerataan hasil pembangunan belum dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baru pada masyarakat kelas tertentu. Penduduk Kabupaten Bantul sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani. Adanya kemarau panjang pada tahun 2023 menyebabkan masa tanam tahun 2023 menjadi mundur di tahun 2024, sehingga produksi pertanian pada tahun 2023 mengalami penurunan dan berdampak pada pendapatan petani. Dari segi tenaga kerja, terjadi penambahan jumlah tenaga kerja buruh harian lepas. Namun kenaikan jumlah tenaga kerja buruh harian lepas tersebut dari segi pendapatan masih sangat kecil, sehingga berdampak pada kenaikan rasio gini.

Permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja utama persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi:

1. Pemerintah Daerah tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait instrument/komponen yang dipergunakan untuk melakukan survei/perhitungan indikator daerah sehingga Pemerintah Daerah kesulitan melakukan intervensi.

Solusi:

1. Kerjasama dan koordinasi yang intensif dengan BPS dan Kementerian yang melakukan survei/perhitungan indikator daerah agar Pemerintah Daerah mendapatkan pemahaman terhadap substansi evaluasi yang dilakukan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah dalam rangka pengumpulan dan penyusunan data sehingga data yang tersaji adalah data yang berkualitas dan valid, serta data terkumpul tepat waktu.

Berikut dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan indikator kinerja persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi:



Gambar III-6 Rapat Koordinasi Pengendalian Tahun 2023



Gambar III-7 Bimtek Aplikasi ESAKIP

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator capaian Tingkat pelestarian situs warisan Geologi (Geoheritage) pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 20% tercapai sebesar 20% program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
- 2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan indikator persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan antara lain:
 - a. Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 86 tercapai sebesar 85,63. Program ini didukung kegiatan antara lain:
 - a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator capaian (1) persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan Pembangunan daerah tahunan (RKPD) pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, dan (2) persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain:
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- 5. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator capaian (1) persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, (2) persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang Perekonomian dan SDA pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, dan (3) persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain:
 - a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
 - c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

2. Sasaran Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan

Penelitian dan pengembangan (Litbang) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis baik yang bersifat epistemology maupun bersifat empiris dalam memperoleh informasi, data dan atau pembuktian terhadap kebenaran yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Peran litbang dalam tata Kelola pemerintahah adalah mengidentifikasi setiap permasalahan baik yang bersifat actual maupun prediktif yang berkembang di daerah. Hasil penelitian dan pengembangan diharapkan dapat digunakan dalam penyusunan dokumen yang dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah untuk Pembangunan daerah.

Selanjutnya rencana dan realisasi capaian sasaran meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan ditampilkan pada tabel III-6 berikut:

Tabel III. 6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan

				2023			CAPAIAN
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2022	Target	Realisasi	% Realisasi	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	TERHADAP AKHIR RENSTRA TAHUN 2026 (%)
1.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100	100%	100

Sumber: Esakip Tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 sama dengan capaian tahun 2022.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100% Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Data pendukung dalam pencapaian indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan ditampilkan dalam tabel III-7:

Tabel III. 7 Data Jumlah Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2023
1	Jumlah hasil penelitian dan	Buah	82
	pengembangan yang		
	dimanfaatkan		
2	Jumlah seluruh hasil penelitian	Buah	82
	dan pengembangan		

Sumber: Data Bappeda Tahun 2023

Hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan adalah hasil penelitian dan pengembangan yang sudah dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk melakukan analisis dan/atau penelitian lanjutan.

Data dukung jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan ditampilkan dalam tabel III.8 berikut ini:

Tabel III. 8 Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan

NO	PERGURUAN TINGGI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	WAKTU	NAMA PENELITI	SUMBER ANGGARAN	PENERIMA PEMANFAAT	YANG MEMANFAATKAN
1	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	PERAN FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM KELANGSUNGAN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI BANTUL		Februari – Juli 2023	Ignatius Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc	Rp. 12.500.000 (Internal UAJY)	Menguji faktor- faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan koperasi	DKUMP
2		Pengembangan Pendidikan Berkelanjutan bagi Generasi Muda Melalui Seni Pertunjukan Tradisional Macapat di Desa Bangunjiwo Kasihan Bantul DIY	Bangunjiwo Kasihan	Mei- November 2023	Dr. Rr. Siti Murtiningsih	Rp20.000.000	Pemerintah Desa Bangunjiwo	DINAS PENDIDIKAN, Kalurahan Bangunjiwo
3	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Pendampingan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) untuk Membangun Budaya Aman Sekolah di SMP-SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta	Argomulyo Sedayu	Mei- November 2024	Dr.rer.nat Muhammad Anggri Setiawan, M.Si	Rp20.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul Kalurahan Argomulyo	DINAS PENDIDIKAN, BPBD
4		Edukasi Pencegahan Penyakit Cacingan (Helminthiasis) pada Domba Melalui Tata Kelola Peternakan Sehat Dalam Mendukung Kawasan Agroedutechnopark	Sriharjo Imogiri	Mei- November 2025	Dr. drh. Soedarmanto Indarjulianto	Rp20.000.000	Kalurahan Sriharjo	DINAS KESEHATAN, MAHASISWA

NO	PERGURUAN TINGGI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	WAKTU	NAMA PENELITI	SUMBER ANGGARAN	PENERIMA PEMANFAAT	YANG MEMANFAATKAN
		di Dusun Sompok, Kalurahan Sriharjo						
5		Pendidikan Pengelolaan Sampah Masyarakat Guwosari dalam Mendukung Optimalisasi Unit Pengolahan Sampah GSTC (Gowasari Training Center) di Kalurahan Guwosari, Kapanewonan Pajangan, Kabupaten Bantul	Guwosari Pajangan	Mei- November 2026	DrIng. Ir. Teguh Ariyanto, ST, MEng., IPM.	Rp20.000.000	Kalurahan Guwosari Guwosari Training Center (GSTC)	DINAS LINGKINGAN HIDUP (UPTD KEBERSIHAN)
6		Penguatan Local Leadership dalam Community Based Disaster Risk Reduction (CBDRR) Melalui Pengembangan Pojok Edukasi di Padukuhan Sompok, Sriharjo, Imogiri, Bantul	Sriharjo Imogiri	Mei- November 2028	Dr. Abdur Rofi', S.Si., M.Si.	Rp35.000.000	Padukuhan Sompok	DISPUSIP, MAHASISWA

NO	PERGURUAN TINGGI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	WAKTU	NAMA PENELITI	SUMBER ANGGARAN	PENERIMA PEMANFAAT	YANG MEMANFAATKAN
7		Penguatan Kelembagaan dan Pemasaran Kelompok Pengolah Ikan dalam Rangka Optimalisasi Desa Wisata Kampung Gurami di Kalurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul Tahun ke 2	Tirtomulyo Kretek	Mei- November 2029	Dr. R.A. Siti Ari Budhiyanti, S.T.P., M.P.	Rp35.000.000	Kalurahan Tirtomulyo	DINAS PARIWISATA
8		Digitalisasi Sitti (Sistem Integrasi Tanaman Ternak Ikan) Untuk Mendukung Pengembangan Diversifikasi Produk dan Capacity Building di Desa Sriharjo	Sriharjo Imogiri	Mei- November 2030	Andri Prima Nugroho, S.T.P., M.Sc., Ph.D.	Rp35.000.000	Masyarakat Sriharjo	DKP
9		Capacity Building Warga Kelurahan Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, di Yogyakarta dengan Optimalisasi Lahan dan Produk Biofarmaka Tahun ke 2	Selopamioro Imogiri	Mei- November 2031	Dr. Djoko Santosa, M. Si.	Rp35.000.000		MAHASISWA

NO	PERGURUAN TINGGI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	WAKTU	NAMA PENELITI	SUMBER ANGGARAN	PENERIMA PEMANFAAT	YANG MEMANFAATKAN
10		Metode Self Organizing Map Untuk Mengidentifikasi Kerentanan Sosial, Ekonomi, dan Kepadatan Bangunan Terhadap Ancaman Bencana Gempabumi dan Tsunami Di Kabupaten Bantul	Wilayah Bantul	April-November	Yohana Noradika Maharani	UPN Veteran Yogyakarta	Pemda dan masyarakat Bantul	BPBD, MAHASISWA
11	UPN VETERAN YOGYAKARTA	Analisis Pengaruh Literasi Digital dan Transformasi Digital Terhadap Minat Menjadi Petani Milenial Bagi Generasi Muda Desa Candran, Imogiri Bantul	Desa Candran, Imogiri Bantul	April-November	Revta Fariszy	UPN Veteran Yogyakarta	Petani Milenial Bagi Generasi Muda Desa Candran, Imogiri Bantul	DINAS PERTANIAN, MAHASISWA
12		Strategi Pengembangan Wisata Berwawasan Lingkungan Di Desa Wisata Wukirsari, Imogiri, Bantul	Desa Wisata Wukirsari, Imogiri, Bantul	April-November	Humam Santosa Utomo	UPN Veteran Yogyakarta	Masyarakat Desa Wisata Wukirsari, Imogiri, Bantul	DINAS PARIWISATA
13		Integrasi Internet Of Things (IoT) Untuk Pengawasan Daerah Rawan Bencana Di Desa Karang Tengah, Imogiri, Bantul Yogyakarta	Desa Karang Tengah, Imogiri, Bantul Yogyakarta	April-November	Eko Teguh Paripurno	UPN Veteran Yogyakarta	Masyarakat Desa Karang Tengah, Imogiri, Bantul Yogyakarta	BPBD

NO	PERGURUAN TINGGI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	WAKTU	NAMA PENELITI	SUMBER ANGGARAN	PENERIMA PEMANFAAT	YANG MEMANFAATKAN
14	UNIVERSITAS	RISIKO PAPARAN LOGAM BERAT DI UDARA AMBIEN PADA PEMULUNG DI TPA PIYUNGAN, BANTUL	Piyungan	31 March 2023	Azham Umar Abidin, S.K.M., M.P.H.	UII		DINAS KESEHATAN
15	ISLAM INDONESIA (UII)	PENGEMBANGAN ASET TANAH WAKAF BERBASIS KEY PERFORMANCE INDEX PADA PERWAKILAN BWI SLEMAN DAN BANTUL		31 March 2023	Siti Achiria, Dr., S.E., M.M.	UII		BWI (Badan Wakaf Indonesia), MAHASISWA
16		Pengembangan Model Smart Farming untuk Optimalisasi Pertanian pada Tanaman Holtikultura	Dusun Tambak, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Maret 2023- November 2023	Dr. Marti Widya Sari, S.T, M.Eng R. Hafid Hardyanto, M.Pd Prahenusa Wahyu Ciptadi, M.T	DRTPM Kemendikbudristek 2023	Masarakat Dusun Tambak, Ngestiharjo, Kasihan	DINAS PERTANIAN
17	UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA	Pengembangan Model Pembelajaran berbasis Social capital dan Cultural Capital Sebagai Strategi Menumbuhkan Ketrampilan Literasi Ketahanan Pangan Siswa SD	Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Maret 2023- November 2023	Dr. Dhiniaty Gularso, S.Si, M.Pd Dr. Ari Wibowo, M.Pd Dr. Okti Puurwaningsih, M.P	DRTPM Kemendikbudristek 2023	Sekolah Dasar di wilayah Ngestiharjo, Kasihan	DINAS PENDIDIKAN

NO	PERGURUAN TINGGI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	WAKTU	NAMA PENELITI	SUMBER ANGGARAN	PENERIMA PEMANFAAT	YANG MEMANFAATKAN
18		Analisis Outcome Klinis Terhadap Kualitas Hidup dan Biaya Medik Langsung Pasien Hipertensi Rawat Jalan di RSUD Panembahan Senopati	Bantul Kota	Maret 2023- November 2023	apt.Anis Febri Nilansari,M.Pharm,Sci	DRTPM Kemendikbudristek 2023	Masyarakat pasien Hipertensi Rawat Jalan	DINAS KESEHATAN, MAHASISWA
19		Model Pembelajaran Kebencanaan Berbasis SETS (Science, Environment, Technology, and Society) Dalam Meningkatkan Literasi Bencana Siswa Sekolah Dasar	Pundong Bantul	Maret 2023- November 2023	Dr. Setyo Eko Atmojo, M.Pd	DRTPM Kemendikbudristek 2023	Sekolah Dasar di wilayah Pundong Bantul	DINAS PENDIDIKAN
20		Penerapan Industrial Internet of Things pada Social Manufacturing	Tambak, Ngestiharjo, Kasihan	Oktober 2022-Juli 2023	Dr. Marti Widya Sari, S.T, M.Eng	Internal PT	Masarakat Dusun Tambak, Ngestiharjo, Kasihan	DISNAKERTRANS
21		Pengaruh Kecemasan Matematika dalam Hubungan antara Efikasi Diri dan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis pada Mahasiswa PGSD	Ngestiharjo, Kasihan	Oktober 2022-Juli 2023	Dr. Budiharti S.Si., M.Pd	Internal PT	Mahasiswa calon guru sekolah dasar PGSD UPY	GURU, ,MAHASISWA

NO	PERGURUAN TINGGI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	WAKTU	NAMA PENELITI	SUMBER ANGGARAN	PENERIMA PEMANFAAT	YANG MEMANFAATKAN
22		ANALISIS PENGETAHUAN LITERASI FINANSIAL SISWA SEKOLAH MENENGAH SE- DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	DIY	Oktober 2022-Juli 2023	LAELA SAGITA S.Pd., M.Sc.	Internal PT	Sekolah Menenngah se- DIY	TENAGA PENDIDIK
23		Penggunaan Eco- enzym pada Budidaya Jahe Merah (Zingiber officinale var. Rubrum) untuk Proteksi Tanaman dan Meningkatkan Kualitas Rimpang	Green House UPY Ngestiharjo, Kasihan	Oktober 2022-Juli 2023	Dr. Okti Purwaningsih M.P Puguh Bintang Pamungkas S.P., M.P Rahmat A.Hi Wahid M.Farm	Internal PT	Masyarakat Ngestiharjo, Kasihan	MASYARAKAT
24		Karakterisasi Senyawa Bioaktif dan Aktivitas Antioksidan pada Cokelat Bubuk di D.I Yogyakarta	Green House UPY Ngestiharjo, Kasihan	Oktober 2022-Juli 2023	Atika Nur Syarifah S.Tp., M.Sc. Dewi Amrih S.TP., M.Sc. Lana Santika Nadia S.TP., M.Sc.	Internal PT	Masyarakat Ngestiharjo, Kasihan	DINAS KESEHATAN
25		Pengaruh Aplikasi Ekstrak Alang-alang dan Jarak Tanam terhadap Pertumbuhan Gulma pada Budidaya Padi	Green House UPY Ngestiharjo, Kasihan	Oktober 2022-Juli 2023	Dr. Paiman M.P Ardiyanto M.Sc C. Tri Kusumastuti, M.Sc	Internal PT	Masyarakat Ngestiharjo, Kasihan	DINAS PERTANIAN
26		Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Program Studi PBSI Universitas PGRI	Prodi PBSI UPY	Oktober 2022-Juli 2023	Fitri Jamilah M.Pd	Internal PT	Mahasiswa calon Guru Bahasa Indonesia	MAHASISWA

NO	PERGURUAN TINGGI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	WAKTU	NAMA PENELITI	SUMBER ANGGARAN	PENERIMA PEMANFAAT	YANG MEMANFAATKAN
		Yogyakarta						
27		Pemahaman Siswa SMP di Provinsi DIY Terhadap Konsep Keistemewaan Yogyakarta	SMP se-DIY	Oktober 2022-Juli 2023	Dr. Victor Novianto M.Hum	Internal PT	SMP se-DIY	TENAGA PENDIDIK
28		Kawruh Pamomong Ki Ageng Suryomentaram dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SD Brajan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta	Tamantirto Kasihan Bantul	Oktober 2022-Juli 2023	Dr. Dhiniaty Gularso S.Si., M.Pd	Internal PT	SD Brajan Tamantirto Kasihan	TENAGA PENDIDIK
29		Pengembangan E- Book Pendidikan Inklusi Berbasis Android dengan Pendekatan Sistemik untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Mahasiswa PGSD UPY	Kasihan Bantul	Oktober 2022-Juli 2023	Dr. Sukadari S. H., MM Mahilda Dea Komalasari M.Pd	Internal PT	Mahasiswa Calon Guru SD	TENAGA PENDIDIK
30		Studi kebutuhan pembelajaran keterampilan otomotif pada Madarasah Aliyah Negeri di Kabupaten Bantul	Bantul	Oktober 2022-Juli 2023	Didik Rohmantoro M.Pd	Internal PT	Guru dan Siswa MA di kabupaten Bantul	TENAGA PENDIDIK

NO	PERGURUAN TINGGI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	WAKTU	NAMA PENELITI	SUMBER ANGGARAN	PENERIMA PEMANFAAT	YANG MEMANFAATKAN
31		OPTIMALISASI PEMBELAJARAN MELALUI PROJECT BASED LEARNING (PBL) DENGAN MUATAN STEAM DI LEMBAGA PAUD KABUPATEN BANTUL	LEMBAGA PAUD KABUPATEN BANTUL	Oktober 2022-Juli 2023	Windi Wulandari Iman Utama M.Pd. Novianti Retno Utami M.Pd. Khikmah Novitasari M.Pd	Internal PT	LEMBAGA PAUD KABUPATEN BANTUL	TENAGA PENDIDIK
32		Pengembangan Model SLCL (Sign Language Colaborative learning) Berbasis Local Wisdom Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Isyarat Calon Guru Sekolah Luar Biasa	Kasihan Bantul	Oktober 2022-Juli 2023	Faiz Noormiyanto S.Pd., M.Pd	Internal PT	Calon Guru Sekolah Luar Biasa	TENAGA PENDIDIK
33		Pendidikan Holistik dan Pengembangan Potensi Anak Usia Dini Di Satuan PAUD Sejenis Mekar Kasihan, Bantul, Yogyakarta Tahun Ajaran 2022/2023	Kasihan Bantul	Oktober 2022-Juli 2023	Dr. Salamah M.Pd	Internal PT	PAUD Sejenis Mekar Kasihan, Bantul,	TENAGA PENDIDIK
34		Kajian Farmakoekonomi Penggunaan Obat Antihipertensi pada Pasien Hipertensi dengan COVID-19 di RSUD Panembahan	Bantul	Oktober 2022-Juli 2023	Anis Febri Nilansari S.Farm., M.Phar	Internal PT	Pasien Hipertensi dengan COVID- 19 di RSUD Panembahan Senopati Bantul	DINAS KESEHATAN

NO	PERGURUAN TINGGI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	WAKTU	NAMA PENELITI	SUMBER ANGGARAN	PENERIMA PEMANFAAT	YANG MEMANFAATKAN
		Senopati Bantul						
35		Pengembangan E- modul Matematika Model Flipped Classroom Pada Pembelajaran Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Kelas V SDN Donotirto	Donotirto, Bangunjiwo, Kasihan	Oktober 2022-Juli 2023	Danuri M.Pd Padrul jana M.Sc	Internal PT	Guru dan siswa SD N Donotirto	TENAGA PENDIDIK
36		Desain Manajemen sampah berbasi IoT di FST UPY	Ngestiharjo, Kasihan	Oktober 2022-Juli 2023	R. Hafid Hadyanto M.Pd.	Internal PT	Masyarakat Sekitar Ngestiharjo, Kasihan	DINAS LINGKINGAN HIDUP (UPTD KEBERSIHAN)
37	UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA	APLIKASI MOOD TRACKER SEBAGAI PENDUKUNG KESEHATAN MENTAL MAHASISWA	Cafesico, Sanggrahan RT01, Ringinharjo, Bantul	April – November 2023	1. Agata Filiana, S.Kom.,M.Sc. 2. Maria Nila Anggia Rini, ST.,MTI	LPPM UKDW	IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA PENGURUS WILAYAH DIY	DINAS KESEHATAN
38	INSTITUT SENI INDONESIA	Sanggit dan Garap Lakon Tumusing Jangka Wayang Kulit Diponegoro Karya Catur Kuncoro	Kadipiro, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	9 Mei - 22 November 2022	Dr. Dewanto Sukistono, S.Sn., M.Sn.	PNBP	Masyarakat Seni Pedalangan Kab. Bantul	DINAS KEBUDAYAAN

NO	PERGURUAN TINGGI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	WAKTU	NAMA PENELITI	SUMBER ANGGARAN	PENERIMA PEMANFAAT	YANG MEMANFAATKAN
39		Implementasi Model Based Learning Pada Pembelajaran Tari Jenjang Smp Dalam Kurikulum Merdeka	SMP Negeri se- Kecamatan Sewon, Bantul	10 Mei - 22 November 2022	Dra. Antonia Indrawati, M.Si.	PNBP	Siswa-Siswi SMP se Kecamatan Sewon	TENAGA PENDIDIK
40		Hubungan Model Pelatihan Dengan Kemampuan Mengajar Musik Pada Guru SD	SD Negeri Kembangsongo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul	11 Mei - 22 November 2022	H. Mulyadi Cahyorahardjo, S. Sn., M.Sn	PNBP	Guru SD Negeri Kembangsongo	TENAGA PENDIDIK
41		Perancangan PPT Game Instrumen Musik Tradisional Sebagai Strategi Transmisi Pembelajaran Anak Usia Dini di TK ABA Dongkelan Yogyakarta	TK ABA Dongkelan Bantul Yogyakarta	12 Mei - 22 November 2022	Dr. Eli Irawati, S.Sn., M.A	PNBP	Siswa-Siswi TK ABA Dongkelan Bantul Yogyakarta	TENAGA PENDIDIK
42	INSTITUT TEKNOLOGI YOGYAKARTA	Pengembangan Sistem Informasi Geografi Untuk Pemantauan Jaringan Irigasi Menggunakan LeafletJS	Daerah Irigrasi Ngembong, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	2023	Sumarsono Evy Kusumaningrum	Pengairan Opak Oyo	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengamatan Pengairan Opak Oyo	DPU
43		Inovasi Pemanfaatan Minyak Jelantah menjadi Sabun Cair Antibakteri	Banguntapan	2023	Chetta Aradhitya Sufi, Desi Erlita, Ernastin Maria	Mandiri	Masyarakat	DINAS LINGKINGAN HIDUP (UPTD KEBERSIHAN)
44		Karakteristik Biobriket Ampas Tebu Pt.Madubaru Pg Madukismo Yogyakarta	PT.Madubaru PG.Madukismo Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta	2023	Dimas Taufiq Ridlo, Ucik Ika Fenti Styana	Mandiri	Masyarakat	DINAS LINGKINGAN HIDUP

NO	PERGURUAN TINGGI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	WAKTU	NAMA PENELITI	SUMBER ANGGARAN	PENERIMA PEMANFAAT	YANG MEMANFAATKAN
45		Analisa Kualitas Produk Sabun Minyak Jelantah Bank Sampah Lestari Sesuai SNI 3532-2016	Bank Sampah Lestari yang berlokasi di Potorono, Banguntapan, Bantul	March 2023	Amallia Puspitasari, S.P., M.Sc	ITY	Masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
46		Analisis Kerusakan Lingkungan Fisik pada penambangan pasir sungai di wilayah kalurahan sendangsari kapanewon pajangan, kab bantu	kalurahan sendangsari kapanewon pajangan, kab Bantul	March 2023	Asri Fridtriyanda, S.T., M.T	ITY	Masyarakat	DPU
47		Efektivitas Absorpsi Logam Fe dan Mn oleh Mata Lele (Lemna minor): Studi Kasus Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong, Bantul, DIY	Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong, Bantul, DIY	March 2023	Dr. Ali Aulia Ghozali, S.Si., M.Si Dr. Dewi Eviane, S.Si., M.Sc	ITY	Masyarakat	DINAS PERIKANAN
48	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL	Pengaruh Perubahan Tata Guna Lahan terhadap Sedimentasi pada Sungai Oyo Hilir Kabupaten Bantul Yogyakarta	Imogiri, Bantul	20 Juni - 20 Desember 2023	Anggi Hermawan, ST., M.Eng. (Prodi Teknik Sipil)	Internal Perguruan Tinggi (ITNY)		DPU
49	YOGYAKARTA (ITNY)	Pengaruh Air terhadap Kestabilan Lereng pada Tebing Sungai Progo di Wilayah Sentolo-	Sentolo, Kulonprogo, DIY dan Sedayu, Bantul, DIY	21 Juni - 20 Desember 2023	Dr. T. Listyani Retno Astuti, ST., MT. (Prodi Teknik Geologi)	Internal Perguruan Tinggi (ITNY)		DPU

NO	PERGURUAN TINGGI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	WAKTU	NAMA PENELITI	SUMBER ANGGARAN	PENERIMA PEMANFAAT	YANG MEMANFAATKAN
		Sedayu, Yogyakarta						
50		Analisis Perbandingan Aktualisasi Waste pada Pembesian Kolom, Balok, dan Pelat Lantai pada Bangunan Kost Eksklusif 2 Lantai di Bantul	Bantul, DIY	22 Juni - 20 Desember 2023	Rizal Maulana, ST., MT. (Prodi Teknik Sipil)	Internal Perguruan Tinggi (ITNY)		DPU
51	INSTITUT SAINS AKPRIND	Waste to Green Energy: Pemanfaatan Sampah Biomassa sebagai Sumber Energi Kalor Mesin Sanggrai Maggot	Guwosari Pajangan	Juli-Desember 2023	Prof.Dr.A.A.Putu Susastriawan, S.T, M.Tech	DRTPM, Pendidikan Tinggim Kemendikbud Ristek	Komunitas Rentan Marginal "Mekar Jaya"	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
52		Pengukuran Dan Analisis Kinerja Industri Kreatif Batik Wukirsari Bantul	Wukirsari Bantu	2018	Yasrin Zabidi, S.T., M.T	Internal (ITD Adisutjipto)	Pelatihan	DKUMP
53	ITD Adisutjipto	Perancangan Instrumen Pengukuran Produktivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kerajinan Batik Kayu Krebet Bantul	Krebet Bantul	2020	Yasrin Zabidi, S.T., M.T	Internal (ITD Adisutjipto)	Pelatihan	DKUMP

NO	PERGURUAN TINGGI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	WAKTU	NAMA PENELITI	SUMBER ANGGARAN	PENERIMA PEMANFAAT	YANG MEMANFAATKAN
54	STIKES AKBIDYO	MODEL PROMOSI KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN MINUM TABLET TAMBAH DARAH REMAJA PUTRI DI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA	KABUPATEN BANTUL	1 TAHUN	Dr. Retno Heru Setyorini, SST.Keb.,MPH Era Revika, SST.,M.Kes	INSTITUSI	REMAJA PUTRI	DINAS KESEHATAN
55		Perbandingan Antara Tepung dan Teh Daun Kelor Sebagai Galactogogue Terhadap Tingkat Hormon Prolactin Dalam Mendukung Pemberian ASI Pada Ibu Menyusui	KABUPATEN BANTUL	1 TAHUN	Sylvi Wafda Nur Amelia,S.ST.,M.Kes Riadini Wahyu Utami, S.ST.,MPH Desi Ekawati, S.ST, MPH	PDP	IBU MENYUSUI	DINAS KESEHATAN
56		PENENTUAN KADAR KAFEIN DALAM BUANG, BIJI, KULIT BUAH DAN DAUN KOPI ARABIKA (Coffea arabica) DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETER UV-VIS	STIKes AKBIDYO	1 TAHUN	Apt Mega Karina Putri, M.Pharm.Sci Apt. Beta Ria Erika Marita Dellima., M .Sc	INSTITUSI	BUANG, BIJI KOPI,KULIT BUAH KOPI & DAUN DEWASA KOPI	DINAS PERTANIAN
57		FORMULASI SABUN PADAT EKSTRAK DAUN KELOR (Moringa OLEIFERA Lam)	STIKes AKBIDYO	1 TAHUN	Apt. Beta Ria Erika Marita Dellima., M .Sc Eni Kartika Sari, M.Sc	INSTITUSI	DAUN KELOR	DINAS KESEHATAN

NO	PERGURUAN TINGGI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	WAKTU	NAMA PENELITI	SUMBER ANGGARAN	PENERIMA PEMANFAAT	YANG MEMANFAATKAN
58		UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL UMBI RUMPUT TEKI (Cyperus rotundus L) DENGAN METODE DPPH	STIKes AKBIDYO	1 TAHUN	Eni Kartika Sari, M.Sc Apt. Beta Ria Erika Marita Dellima., M .Sc	INSTITUSI	RUMPUT TEKI	DINAS KESEHATAN
59		Eksplorasi Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Kopi sebagai Antioxidant Sleeping Mask Gel	STIKes AKBIDYO	1 TAHUN	Apt Mega Karina Putri, M.Pharm.Sci Apt. Beta Ria Erika Marita Dellima., M .Sc	PDP	KULIT BUAH KOPI	DINAS KESEHATAN
60		PENENTUAN KADAR KAFEIN DAN ASAM KLOROGENAT PADA KULIT BUAH KOPI ARABIKA DAN KOPI ROBUSTA	STIKes AKBIDYO	1 TAHUN	apt Mega Karina Putri, M.Pharm.Sci apt. Beta Ria Erika Marita Dellima., M .Sc Eni Kartika Sari, M.Sc	MANDIRI	KULIT BUAH KOPI ARABIKA DAN KOPI ROBUSTA	DINAS KESEHATAN
61		ANALISIS TATA RUANG SESUAI PENERAPAN ERGONOMI DI RUANG FILING UNIT REKAM MEDIS RSKIA UMMI KHASANAH	RSKIA UMMI KHASANAH BANTUL	1 TAHUN	Nanda Surya Febrianta, SKM.,MMR Tria Harsiwi Nurul Insani, SST., MMR	INSTITUSI	REKAM MEDIS	DPU
62		ANALISIS KESIAPAN IMPLEMENTASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI PUSKESMAS PAJANGAN BANTUL	PUSKESMAS PAJANGAN BANTUL	1 TAHUN	Nurvita Wikansari, SKM.,MPH Nanda Surya Febrianta, SKM.,MMR	INSTITUSI	REKAM MEDIS	DINAS KESEHATAN

NO	PERGURUAN TINGGI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	WAKTU	NAMA PENELITI	SUMBER ANGGARAN	PENERIMA PEMANFAAT	YANG MEMANFAATKAN
63		KESIAPAN UNSUR MANAJEMEN DALAM MENGHADAPI PENERAPAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI KLINIK PRATAMA ANUGRAH	KLINIK PRATAMA ANUGRAH BANTUL	1 TAHUN	Tria Harsiwi Nurul Insani, SST.,MMR Vonita Indra Andriyani, SE., MM	INSTITUSI	REKAM MEDIS	MAHASISWA
64		PARTISIPASI KELUARGA DALAM TUMBUH KEMBANG ANAK DAN REMAJA SEBAGAI LITERASI PENGASUHAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DI DESA TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL	DESA TIMBULHARJO SEWON BANTUL	1 TAHUN	Dr. Fitriani Mediastuti, S.Si.,M.Kes Reni Tri Lestari Amd.Keb . SKM.,M.H.Kes	INSTITUSI	ANAK DAN REMAJA	DINAS KESEHATAN
65		PENGARUH PEMBERIAN MULTIPLE MIKRO NUTRIEN PADA IBU HAMIL TERHADAP BERAT BAYI LAHIR	KLINIK ASIH WALUYOJATI GROJOGAN WIROKERTEN BANGUNTAPAN BANTUL	1 TAHUN	Dr. Eny Retna Ambarwati, S.SiT.,M.Kes Reni Tri Lestari Amd.Keb . SKM.,M.H.Kes	INSTITUSI	IBU HAMIL	TENAGA MEDIS
66		DETERMINAN PERILAKU IBU HAMIL DALAM PENCEGAHAN ANEMIA DI KABUPATEN BANTUL	KABUPATEN BANTUL	1 TAHUN	Nining Tunggal Sri Sunarti, SKM.,MPH Winarsih, S.SiT.,M.Kes	INSTITUSI	IBU HAMIL	TENAGA MEDIS

NO	PERGURUAN TINGGI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	WAKTU	NAMA PENELITI	SUMBER ANGGARAN	PENERIMA PEMANFAAT	YANG MEMANFAATKAN
67		Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada Tatanan Tempat Kerja Warga Binaan Pemasyarakatan	Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul	4 Bulan	Rinawati Zailani, S.P., M.Sc Dalrisman	STIKIP Catur Sakti	Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul	DINAS KESEHATAN
68		Pengaruh Kegiatan Bermain Peran Terhadap Sosial Emosional Anak Usia 2-4 Tahun di PAUD	Kelurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul	4 Bulan	Rinawati Zailani, S.P., M.Sc Sunarti	STIKIP Catur Sakti	Siswa PAUD	TENAGA PENDIDIK
69	STIKIP CATUR	Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Anak Melalui Permainan Tradisional Lompat Tali	KB Kuncup Lanteng 1 Selopamioro Imogiri Bantul	4 Bulan	Rinawati Zailani, S.P., M.Sc Sariyanti	STIKIP Catur Sakti	Siswa KB Kuncup Lanteng 1 Selopamioro Imogiri Bantul	TENAGA PENDIDIK
70	SAKTI	Penerapan Model Belajar dan Bermain dalam Upaya Meningkatkan Gerakan Dasar	Kelompok Bermain Pisang Banyuurip Jatimulyo Dlingo Bantul	4 Bulan	Choirun Nisaa', M.Pd.I Wagirah	STIKIP Catur Sakti	Siswa Kelompok Bermain Pisang Banyuurip Jatimulyo Dlingo Bantul	TENAGA PENDIDIK
71		Implementasi Pemanfaatan Bahan Alam Sebagai Media Pembelajaran Anak Usia Dini	KB Bougenville Lungguh Temuwuh Dlingo Bantul	4 Bulan	Choirun Nisaa', M.Pd.I Patmiyati	STIKIP Catur Sakti	Siswa KB Bougenville Lungguh Temuwuh Dlingo Bantul	TENAGA PENDIDIK
72		Implementasi Metode Belajar Problem Based Learning Pada Kemampuan Berfikir Kreatif Peserta Didik Kelas Xa	SMK Islam Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang	4 Bulan	Rinawati Zailani, S.P., M.Sc Supangat	STIKIP Catur Sakti	Peserta Didik Kelas Xa SMK Islam Secang	TENAGA PENDIDIK

NO	PERGURUAN TINGGI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	WAKTU	NAMA PENELITI	SUMBER ANGGARAN	PENERIMA PEMANFAAT	YANG MEMANFAATKAN
73		Dampak Pemberian Reward Dan Punisment Terhadap Kinerja Karyawan	SMP Negeri 4 Pandak Bantul	4 Bulan	Rinawati Zailani, S.P., M.Sc Achmad Jalaludin	STIKIP Catur Sakti	Karyawan SMP Negeri 4 Pandak Bantul	DINAS PENDIDIKAN
74		Identifikasi Minat Baca Masyarakat di Taman Bacaan Masyarakat Widuri Pandan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul	Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul	4 Bulan	Rinawati Zailani, S.P., M.Sc Siti Zamronah	STIKIP Catur Sakti	Masyarakat Widuri Pandan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul	TENAGA PENDIDIK
75		Implementasi Program Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan	Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul Tahun 2022	4 Bulan	Didik Kurniawan, M.Pd Kuncoro Mukti	STIKIP Catur Sakti	Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul	MAHASISWA
76		Implementasi Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini Di KB Apel 1 Loputih Jatimulyo Dlingo Bantul	KB Apel 1 Loputih Jatimulyo Dlingo Bantul	4 Bulan	Choirun Nisaa', M.Pd.I Wahyuningsih	STIKIP Catur Sakti	Siswa KB Apel 1 Loputih Jatimulyo	TENAGA PENDIDIK
77		Peran Program Pembina Keagamaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Bantul	Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul	4 Bulan	Choirun Nisaa', M.Pd.I Yunawan Budianto	STIKIP Catur Sakti	Warga Binaan Pemasyarakatan	KESBANGPOL
78		Dampak Konsekuensi Hukum Dari Tindak Pidana Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Bantul	Rutan Kelas II B Bantul	4 Bulan	Rinawati Zailani, S.P., M.Sc Heri Kurniawan	STIKIP Catur Sakti	Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Bantul	MAHASISWA

NO	PERGURUAN TINGGI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	WAKTU	NAMA PENELITI	SUMBER ANGGARAN	PENERIMA PEMANFAAT	YANG MEMANFAATKAN
79		Pelaksanaan Bimbingan Kerja Menjahit Dan Anyaman Keset Pada Warga Binaan Pemasyarakatan	Rutan Kelas II B Bantul Tahun 2023	4 Bulan	Choirun Nisaa', M.Pd.I Catur Indriyanto	STIKIP Catur Sakti	Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Bantul	DINAS KEBUDAYAAN
80		Dampak Pembelajaran Seni Tari Pasca Pandemi Covid-19 di Sanggar Tari Sekar Kinanti Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul	Sanggar Tari Sekar Kinanti Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul	4 Bulan	Rinawati Zailani, S.P., M.Sc Agustina Dita Andrianti	STIKIP Catur Sakti	Komunitas Sanggar Seni Kabupaten Bantul	DINAS KEBUDAYAAN
81	Akademi Farmasi Indonesia	Hubungan Tingkat Kepatuhan Penggunaan Obat Dengan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe II di Puskesmas Bambanglipurro Bantul	Kapanewon Bambanglipuro	Januari hingga Agustus 2023	Apt. Mexsi Mutia Rissa, M.Farm	Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta (AFIYO)	Pasien Puskesmas Bambanglipuro	DINKES
82	Yogyakarta	Tingkat Pengetahuan dan Sikap Terhadap Pengelolaan Penyakit Diabetes Mellitus Tipe II di Dusun Mulyodadi Bantul Yogyakarta	Padukuhan Kepuh Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro	Januari hingga Agustus 2023	Apt. Fitria Dhirisma., M.Pharm.Sci	Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta (AFIYO)	Masyarakat	DINKES, KALURAHAN MULYODADI

Sumber: Bappeda, 2023

Faktor pendukung pencapaian IKU, antara lain:

- a. Adanya Forum Perguruan Tinggi yang sudah berjalan efektif
- b. Adanya peluang dan kesempatan untuk kerjasama dengan stakeholder lebih terbuka

Faktor penghambat pencapaian IKU, yaitu:

- a. Belum optimalnya monitoring penelitian yang dilaksanakan di Perangkat Daerah
- b. Lemahnya akses hasil penelitian, karena izin penelitian langsung kepada Perangkat Daerah/instansi yang bertanggungjawab pada objek penelitian.

Permasalahan:

- 1. Belum semua hasil penelitian sinergi dengan kebutuhan perencanaan daerah
- 2. Belum membudayanya ekosistem inovasi

Solusi:

- Koordinasi intensif Forum Perguruan Tinggi mengacu Rencana Induk Kelitbangan didukung aplikasi kelitbangan
- 2. Pendampingan melalui Studio Inovasi Bantul (SIB) dan menambah sasaran Bantul Innovation Award (BINA)

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Melakukan diseminasi riset dan inovasi yang lebih massif;
- b. Harmonisasi dengan pihak-pihak terkait.

Berikut beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan indikator kinerja persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan:



Gambar III-8 Bantul Innovation Award Tahun 2023



Gambar III-9 Studio Inovasi Bantul

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan antara lain:

i. Bantul Innovation Award (BINA)

Pemerintah Daerah pada era digital dituntut untuk menjadi lebih inovatif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Untuk memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bantul menyelenggarakan Bantul Innovation Award (BINA) 2023 sebagai ajang bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat dalam menciptakan inovasi yang memiliki aspek kemanfaatan bagi Kabupaten Bantul. Bantul Innovation Award (BINA) terdiri dari tiga kategori peserta yaitu perangkat daerah, masyarakat umum atau mahasiswa dan pelajar.

ii. Studio Inovasi Bantul

Studio Inovasi Bantul (SIB) adalah sebuah platform manajemen inovasi terpadu yang berfokus untuk menumbuhkembangkan ekosistem inovasi di Kabupaten Bantul. SIB merupakan wadah diskusi, konsultasi, pendampingan, serta wahana evaluasi untuk meningkatkan kualitas inovasi sehingga menjadi lebih baik lagi. Selain daripada itu, kehadiran SIB juga merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan nilai capaian indeks inovasi daerah.

iii. Manajemen Pelatihan Tenaga Kerja Terintegrasi (MPTKT)

Pembangunan sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Bantul, khususnya dalam upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan tenaga kerja. Namun permasalahan yang dihadapi adalah pelatihan belum sepenuhnya dapat merespon kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, kualitas dan kuantitas tenaga kerja, serta belum adanya sinergitas program pelatihan. Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

daerah perlu mendorong dan mendukung upaya penyelesaian masalah dengan inovasi kebijakan yaitu Manajemen Pelatihan Tenaga Kerja Terintegrasi. Adanya Manajemen Pelatihan Tenaga Kerja Terintegrasi akan dapat mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pelatihan, efektivitas dan efisiensi pelatihan, serta mewujudkan pelayanan prima.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp13.905.283.771,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp13.584.832.633,10, atau sebesar 97,70%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III. 9 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah	6.165.049.930	44,34%
2	Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam Pembangunan	518.568.860	3,73%
	Jumlah	6.683.618.790	48,07%
	Belanja Pendukung	7.221.664.981	51,93%
	Total Belanja	13.905.283.771	100%

Sumber: Bappeda, Tahun 2023

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp6.683.618.790,00 atau sebesar 48,07% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp7.221.664.981,00 atau sebesar 51,93% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan daerah dengan besaran anggaran 44,34% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan sebesar 3,73% dari total anggaran belanja.

Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp7.094.134.547,00 teralisasi sebesar 98,23 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Tabel III. 10 Realisasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah	6.165.049.930	5.987.958.627	43,06%
2	Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam Pembangunan	518.568.860	502.739.459	3,62%
	Jumlah	6.683.618.790	6.490.698.086	46,68%
Belanja Pendukung		7.221.664.981	7.094.134.547	51,02%
	Total Belanja	13.905.283.771	13.584.832.632	97,70%

Sumber: Bappeda, Tahun 2023

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 97,70% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 46,68%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 51,02%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi sebesar 99,55%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebesar 96,95 %. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah menyerap anggaran paling besar yaitu 97,72% dari target.

Sedangkan sasaran meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan menyerap anggaran terkecil yaitu 96,95% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III. 11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

	Indikator		Kinerja		Anggaran		
No	Kinerja	Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100	12.953.190.121	12.650.532.004	97,66
2	Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	96			433.524.790	431.561.170	99,55
3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	100%	100%	100	518.568.860	502.739.459	96,95

Sumber: esakip ROPK tahun 2023

Tabel III. 12 Pencapaian Anggaran Per Sasaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	Al	NGGARAN	
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah	13.386.714.911	13.082.093.174	97,72
2	Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	518.568.860	502.739.459	96,95%

Sumber: ESAKIP 2023

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 2,30%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,38%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0,92%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD sebesar 1,26%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi sebesar 0,01%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 2,19% dari anggaran target. Sedangkan sasaran meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,11% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama dan per sasaran strategis disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 13 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinaria		Anggaran		
NO	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	5.731.525.140	5.556.397.457	175.127.683	1,26
Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi		433.524.790	431.561.170	1.963.620	0,01
3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	518.568.860	502.739.459	15.829.401	0,11
	Jumlah	6.683.618.790	6.490.698.086	192.920.704	1,38
	Belanja Pendukung	7.221.664.981	7.094.134.547	127.530.434	0,92
	Total Belanja	13.905.283.771	13.584.832.633	320.451.138	2,30

Sumber: esakip, tahun 2023

Tabel III. 14 Efisiensi Anggaran Per Sasaran Tahun 2023

No	Sacran Stratogia		Anggaran		
NO	Sasaran Strategis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah	13.386.714.911	13.082.093.174	304.621.737	2,19
Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam Pembangunan		518.568.860	502.739.459	15.829.401	0,11
	Total Belanja	13.905.283.771	13.584.832.633	320.451.138	2,30

Sumber: Esakip, tahun 2023

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan Masyarakat maka **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** Ikut mendukung kegiatan lintas sektor dengan pembagian tugas sebagai berikut:

Tabel III. 15 Lintas Sektor Bappeda Kabupaten Bantul

NO	KEGIATAN LINTAS	KONTRIE	BUSI PARA PIHAK	OUTPUT DAN SASA		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI
	SEKTOR	PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	KELOMPOK SASARAN
1.	Penyusunan Dokumen	Bappeda	Penyelarasan RKPD dengan RPJMD	Dokumen perencanaan	46 Perangkat	Manfaat bagi Bappeda:
	Perencanaan	BPKPAD	Kebijakan penganggaran, SHBJ		Daerah	Mendukung pencapaian tujuan RPJMD dan
		DPRD	Pokok Pikiran DPRD			mendukung
		Bagian Hukum Setda	Penetapan peraturan/keputusan Bupati			pencapaian kinerja sasaran Bappeda
		Inspektorat	Reviu dokumen perencanaa			Manfaat bagi kelompok
		Perguruan Tinggi	Memberikan masukan pada konsultasi publik			sasaran: Acuan pelaksanaan
		LSM/ Ormas	Memberikan masukan pada konsultasi publik			program/kegiatan/ sub kegiatan

NO	KEGIATAN LINTAS	KONTRIE	BUSI PARA PIHAK	OUTPUT DAN SASA		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI
No	SEKTOR	PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	KELOMPOK SASARAN
		Masyarakat	Memberikan masukan pada konsultasi publik			
2.	Penyusunan Dokumen/ Laporan Evaluasi	Bappeda	Mengkoordinasi penyusunan LKPJ	Dokumen/ laporan evaluasi	46 Perangkat Daerah	Manfaat bagi Bappeda: Mendukung
	Pelaksanaan Pembangunan Daerah	DPRD	Kolaborasi pembentukan pansus dalam rangka pembahasan LKPJ hingga menghasilkan catatan rekomendasi LKPJ	pelaksanaan pembangunan daerah		pencapaian kinerja tujuan RPJMD dan mendukung pencapaian kinerja sasaran Bappeda
		BPKPAD	Pertanggungjawaban anggaran			
		Inspektorat	Melakukan reviu dokumen/laporan evaluasi pelaksanaan Pembangunan daerah			Manfaat bagi kelompok sasaran: Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
		Bagian Hukum Setda	Pembahasan peraturan/keputusan Bupati			sub kegiatan dapat menjadi masukan perencanaan tahun berikutnya
3.	Penyelenggaraan Satu Data	Wali data pendukung dan produsen data	Menyampaikan data dan metadata kepada walidata Pembina data	Data statistik, data geospasial	Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Manfaat bagi kelompok sasaran: Hasil kolaborasi dapat dimanfaatkan
		BIG	statistik Pembina data spasial			untuk perencanaan pembangunan, dan dapat dimanfaatkan oleh publik

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum, realisasi 2 (dua) IKU telah tercapai sesuai dengan target, namun 1 (satu) IKU tidak mencapai target, atau rata-rata tercapai sebesar 96,49% atau kinerja kriteria 2 (dua) IKU adalah **Sangat Tinggi** dan 1 (satu) IKU adalah **Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2023 antara lain adalah :

- Adanya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan;
- 2. Adanya sistem informasi dan koordinasi yang intensif.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan Pembangunan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten;

2. Mengoptimalkan sistem kelitbangan dan inovasi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bantul Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2022-2026

					Target per Tahun					
No	Tujuan	Sasaran	Indikator S		2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi AKhir
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	%	100	100	100	100	100	100
	akuntabel	daerah	Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	95	96	96	97	97	97
		Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	2023
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengenda ian dan evaluasi pembangunan	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Jumlah program RKPD dengan RPJMD yang sesuai dibagi jumlah program di RPJMD x 100%	Persen	100
	tinggi dan akuntabel	daerah	Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Jumlah indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi dibagi jumlah indikator sasaran RPJMD x 100%	Persen	96
		Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dibagi seluruh hasil penelitian dan pengembangan kali 100%	Persen	100

Bantul, Januar 2023

BADDEDA TO TENTA TO THE TENTA THE TENTA TO T

80



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ขางงาก วิเมลูลาดังเกา วิเยาชากลูล การ

JI. Robert Wolfer Monginsidi No.1 Bantul , Telp. (0274) 367533, Fax. (0274) 367796 Kode Pos \$5711 Website: http://www.bappeda.bantulkab.go.id E-mail : bappeda@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Ir. FENTY YUSDAYATI, MT

Jabatan

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan

: Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian irii. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 6 Januari 2023

PIHAK KEDUA

BURATI BANTUL

BELOT HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA

PAMA SADAN PERENCANAAN PEMBA GUNAN DAERAH

BAPPEDA

IN DENT YUSDAYATI, N

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya	Tingkat	Persen	100	Triwulan I	-
	kualitas	keselarasan			Triwulan II	100
	perencanaan,	perencanaan, program RKPD			Triwulan III	-
	pengendalian dan	dengan RPJMD			Triwulan IV	-
	evaluasi	1 Glocillado	kator RPJMD	96	Triwulan I	
	pembangunan				Triwulan II	
	daerah	yang mencapai			Triwulan III	
		predikat Tinggi dan Sangat Tinggi (%)			Triwulan IV	96
2.	Meningkatnya	Persentase hasil	Persen	100	Triwulan I	100
	penerapan	erapan penelitian dan		Triwulan II	100	
	penelitian dan pengembangan			Triwulan III	100	
pengembangan yang dalam dimanfaaa pembangunan		lam dimanfaaatkan			Triwulan IV	100

Keterangan:

 Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Dana Alokasi Umum)	Rp. 2.012.003.810,00
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Dana Alokasi Umum)	Rp. 1.708.681.220,00
3.	Program Penelitian dan Pengembangan (Dana Alokasi Umum)	Rp. 529.109.860,00
4.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 273.415.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 626.161.000,00

6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp. 7.649,879,681,00
1	Jumlah Anggaran	Rp. 12.799.250.571,00

Bantul, 6 Januari 2023

PHAK KEDUA

SUPAN BANTUL

DUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA

PEMBANGUNAN DAERAH

LEENTY/USDAYATI, MT

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

เฉเลงบรุงการของ สายบรุงเล่าเปรายา เม่า

JI. Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul , Teip. (0274) 387533, Fax. (0274) 387798 Kode Pos 55711 Website: http://www.bappeda.bantulkab.go.id E-mail : bappeda@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Ir. FENTY YUSDAYATI, MT

Jabatan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan

Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capalan kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 17 November 2023

A PHAK KEDUA BUPATI BANTUL

NHT ABOUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PERENCANAAN

1 Co

r. FENTY YUSBAYATI. MT NR. 196704031994032008

14

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jabatan

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun Anggaran

: 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya	Tingkat	Persen	100	Triwulan I	-
	kualitas	keselarasan			Triwulan II	100)*
	perencanaan,	program RKPD			Triwulan III	-
	pengendalian dan	dengan RPJMD			Triwulan IV	-
	evaluasi	Persentase	Persen	96	Triwulan I	-
	pembangunan	indikator RPJMD			Triwulan II	-
	daerah	yang mencapai			Triwulan III	-
		predikat Tinggi			Triwulan IV	96)*
		dan Sangat				
		Tinggi (%)				
2.	Meningkatnya	Persentase hasil	Persen	100	Triwulan I	100
	penerapan	penelitian dan			Triwulan II	100
	penelitian dan	pengembangan			Triwulan III	100
	pengembangan dalam	yang dimanfaaatkan			Triwulan IV	100
	pembangunan					

Keterangan:

 Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program		Anggaran
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Rp.	1,887,448.810,00
	Pembangunan Daerah (Dana Alokasi Umum)		
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Rp.	2.079932.720,00
	Pembangunan Daerah (Dana Alokasi Umum)		
3.	Program Penelitian dan Pengembangan (Dana	Rp.	518.568.860,00
	Alokasi Umum)		
4.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan	Rp.	273,415,000,00
	Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana		
	Keistimewaan)		

5.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakaria Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 453.541.000,00
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp. 8.692.377.381,00
	Jumlah Anggaran	Rp. 13.905.283.771,00

PHAK KEDUA

BUPATH BANTULA

H'ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, 17 November 2023

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

IF FENTY YUSDAYATI, MT

NJP 196704081994032008



INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Prof. Dr.Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantat Kode Pos 55712 Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : http://www.inspektorat.bantulkab.go.id Posel : inspektorat a bantulkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

Nomor : 061/064.A/Ev.SAKIP/2023

Tanggal : 29 Maret 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. Bantul Telp. (0274) 367325

เตเบาๆพางๆหญางาหานาว

Leman: http://www.inspektorat.banitukab.go.id Posel: inspektorat@banitukab.go.id

Bantul, 29 Maret 2023

Nomor Sifat

: 061/064.A/EV.SAKIP/2023

Yth.Kepala Bappeda Bantul

Kepada

Kabupaten

Lampiran Hal

Biasa

: Laporan

Hasil

Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi

(AKIP) Bappeda Kabupaten

pada Bantul

Tahun 2022

Pemerintah

di -Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Bappeda Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor 64/PKPT/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah (SAKIP) Perangkat Daerah pada Bappeda Kabupaten Bantul.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul,

3. Tujuan Evaluasi

- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah; dan
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan system pengukuran kinerja, penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja dan evaluasi terhadap program dan kegiatan.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Berdasarkan Perda tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan

Daerah Kabupaten Bantul mempunyai fungsi:

- a) Perumusan program kerja Badan;
- Perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- d) Pelaksanaan sinkronisai perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- e) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pembanguan daerah;;
- f) Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi
 Badan
- h) Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan
- Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisai, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintah pada Badan
- j) Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan
- Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Susunan organisasi Bappeda Kabupaten Bantul terdiri atas:

- Kepala Badan.
- Sekretaris.

- Kelompok Substansi Program dan Pelaporan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.
- Kepala Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
 Bidang Perencanaan terdiri:
 - Kelompok Substansi Data dan Informasi dipimpin oleh Subkoordinator.
 - Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD dipimpin oleh Subkoordinator.
 - Kelompok Substansi Perencanaan Pendapatan Keistimewaan dan Non APBD dipimpin oleh Subkoordinator.
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,terdiri :

- Kelompok Substanti Pemerintahan dipimpin oleh Subkoodinator.
- Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Subkoordinator.
- Kelompok Substansi Pengembangan Manusia dipimpin oleh Subkoordinator.
- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri :

- a) Kelompok Substansi Perekonomian dipimpin oleh Subkoordinator.
- Kelompok Substansi Sumber Daya Alam dipimpin oleh Subkoordinator.
- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri:

- a) Kelompok Substansi Infrastruktur dipimpin oleh Subkoordinator.
- Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayaan dipimpin oleh Subkoordinator.

- Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian oleh Kepala Bidang.
 - Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian terdiri:
 - Kelompok Substansi Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah, dipimpin oleh Subkoordinator.
 - Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD dipimpin oleh Subkoordinator.
 - Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD dipimpin oleh Subkoordinator.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Bappeda Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Bappeda Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka Panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Bappeda Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, dan telah dipublikasikan di website.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Kepala Bappeda Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan:

- Dalam penyusunan perencanaan kinerja lebih mengoptimalkan dalam keselarasan sampai kinerja individu, hal ini telah dituangkan dalam matrik peran dan hasil pada SKP.
- Telah dilakukan evaluasi perencanaan kinerja dan penganggaran sebagai bahan masukan untuk perencanaan tahun berikutnya, dengan dilakukan pengendalian terhadap target kinerja setiap bulan.

- Laporan Kinerja telah menjelaskan kegiatan- kegiatan yang sudah dilakuka, solusi yang telah dilakukan serta solusi yang akan dilakukan.
- Laporan Kinerja telah memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kepala Bappeda Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 85,63. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Tahun 2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,25
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,78
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,55
Vilai	Akuntabilitas Kinerja	85,63	
			Α

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,25 atau 87,50% dari bobot sebesar 30 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
Perencanaan Kinerja		30,00	26,25	87,50
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	8,10	90,00
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,75	85,00

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

- a) Bappeda Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (2) Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- b) Bappeda Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2022 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan Perjanjian Kinerja;
- e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
- f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan
- Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan

(cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

- a) Bappeda telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website
- Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, generally accepted), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
- d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
- e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);
- Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
- g) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP

Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Bappeda Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track;

B. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,78 atau 82,60% dari bobot sebesar 30, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2. P	engukuran Kinerja	30,00	24,78	82,60
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,00	83,33
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan tolah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,33	81,43
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja	15,00	12,45	83,00

yang efektif dan efisien

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

- 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.
 - a) Bappeda Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan formulasi penghitungan Indikator Kinerja Utama.
 - c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral dan SIPD
- Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
 - a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Bappeda Kabupaten Bantul sebagian besar telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
 - b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
 - Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi

Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD dan Simral Simpersada.

- Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
 - a) Pengukuran Kinerja oleh Bappeda Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
 - b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
 - Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
 - d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,05 atau 87,00 dari bobot sebesar 15 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3. P	elaporan Kinerja	15,00	13,05	87,00
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	90,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah meme nuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi	4,50	3,60	80,00

	keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya			
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,75	90,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan:

Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan dan dipublikasikan ke dalam website Bappeda.

- Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya
 - a) Dokumen Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen kinerja Bappeda mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) untuk sebelumnya, Laporan kinerja menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

13

 b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesualan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Bappeda Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 21,55 atau 86,20% dari bobot sebesar 25 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4. Eva	aluasi Akuntabilitas Kinerja nal	25,00	21,55	86,20
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	6,00		
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	9,00		
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi	15,00		

Akuntabilitas Kinerja	
Internal sehingga	
memberikan kesan yang	
nyata (dampak) dalam	
efektifitas dan efisiensi	
Kinerja	

Evaluasi lebih lanjut atas Akuntabilitas Kinerja menunjukkan:

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
 - a) Bappeda Kabupaten Bantul telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
 - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
 - a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
 - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.
- Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja
- a) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
- b) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.

 c) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Bantul agar menerapkan manajernen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kabupaten Bantul memperoleh nilai 85,63. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Bappeda Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Bappeda Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

& INSPEKTUR y

HERMAWAN SETIAJI, SIP, MH.

NIP. 19740322 199311 1001

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Bupati Bantul.
- 2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

ansolder voluntume us

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325 Laman: http://www.inspektoral.bantulkab.go.id Posel: inspektoral@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR 84 / PKPT / 2023

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, c. Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023,
- d. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023, dan
- e Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023

MEMERINTAHKAN

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemerikaaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawah	4 HP
2	Sutami, SE, M.Acc.	Pembantu Penanggung Jawab	8 HP
3	Muhammad Tho'at N, S.E., M.Si., M.Acc.	Pengendak Teknis	12 HP
4.	Agus Tri Wahyudi, S.T.	Ketua Tim	12 HP
5.	Susiani, S.E.	Anggota	12 HP
6.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Perneriksaan	4 HP
7.	Liana Indiaty, S.T.	Penunjang Operasional Pemeriksaan	4 HP
8	Choirudin, A.Md.Kom.	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	4 HP

Untuk

Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahrega;

c. Dinas Kesehatan,

d. Dinas Sosial,

e. Kapanewon Kasihan; dan

f. Kapanewon Sedayu.

Tujuan

a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP:

b. Menitai tingkat implementasi SAKIP; dan

Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022

Sasaran Ruang Lingkup

a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;

b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan infornasi kinerja; dan

Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal

: 28 Februari 2023 s.d. 15 Maret 2023.

Bisya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBO Tahun 2023 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan sepertunya

> Ditelapkan di Bantul pada tanggal 21 Februari 2023

& Inspektur, 4

Hermawan Setiaji, S.IP. J Pembina Utama Muda, IV NIP. 19740322 199311 1

Terimaksaih ates kapercayaan Saudota insi Daerah Kabaceren Bantut selalu merangung tinggi nisi-nibi Integritas dalam melaksanakan tugas as perugasan tami, silahkan hubungi 091392000045 asas emait <u>interektoratibihan pelid</u>

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

យុាស្យាការរាភាកាស្ត្រា ។ បញ្ជ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325 Laman: http://www.inspektorat.bantulkab.go.id Posel: inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 71 / PKPT / 2022

Dasar Pengawasan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); dan
- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

Inspektur Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Ir. Suryono, M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Purwanto, S.Psi.	Pengendali Teknis	8 HP
4.	Kusworo Ari Murtejo, S.E.	Ketua Tim	8 HP
5.	Chandra Puspitasari, S.IP.	Anggota	8 HP
6.	Suryanta	Anggota	8 HP
7.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	2 HP
8.	Silakhuddin Al Isro'i	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP
9.	Sri Widiastuti	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP

Untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

- 1. Sekretariat Daerah;
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 3. Dinas Perhubungan;

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5. RSUD Penembahan Senopati Kabupaten Bantul; dan
- 6. Kapanewon Bantul.

Tuiuan

- : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran

Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2021.

Ruang Lingkup

- : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
 - b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan infomasi kineria: dan
 - c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal

07 s.d. 16 Maret 2022

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2022 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demiklan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Bantul, 01 Maret 2022

AH KAB Inspektur

HERMAWAN SETIAJI, SIP, I

INSPEKTORAT

NIP. 19740322 199311 1 001